

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A.A. Andi Prajitno, *Apa dan Siapa PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)*, (Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2016)
- Aartje Tehupeiory, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004)
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010)
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 2*, (Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2004)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Andy Hartanto, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*,(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018)
- \_\_\_\_\_, *Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah*, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2015)
- Angger Sigit Pramukti dan Erdha Widayanto, *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015)
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, (Surabaya:Jakad Media Publishing, 2020)
- Arba dan Diman Ade Mulada, *Hukum Hak Tanggungan (Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda di Atasnya)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2020)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta, Djambatan, 2007)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta:Universitas Trisakti, 2016)
- B.F. Sihombing, *Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah Indonesia*,(Jakarta: Prenadamedia, 2019)
- Gunanegara, *Mengenal Hukum Agraria & Real Estate Law*, (Jakarta: Tatanusa, 2018)
- Gunawan Widjaja, *et.al, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005)
- Hatta Isnaini Wahyu Utomo, *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Hotma Pardomuan Sibue, dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Krakatau Book, 2009)

- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok, Prenadamedia, 2018)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021)
- Mukadir Iskandar Syah, *Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019)
- Oemar Moechtar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Richard Eddy, *Aspek Legal Properti - Teori, Contoh, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010)
- Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016)
- Salim, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- \_\_\_\_\_, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA DUA)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Samsaimun, *Peraturan Jabatan PPAT, Pengantar Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: Universitas Indonesia Press, 1994)
- Solahudin Pugung, *Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021)
- Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006)
- Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta)*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016)
- Waskito dan Hadi Arnowo, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

## JURNAL

- Agus Suhariono, *et.al.*, “Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah (Kajian Sistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif)”, *Notaire Journal of Notarial Law*, Vol.5, No.1, 2022, DOI: <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.21882>
- Asuan, “Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit”, Vol.19, No.1, 2021, DOI: <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i1.329>
- Dedy Mulyana dan Rika Kurniasari Abdughani, “Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Batal Demi Hukum”, *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, Vol.1 No.1 Juni 2021
- Gunanegara dan Clarine Neonardi, “Kepemilikan Hak Atas Tanah Terdaftar Yang Bersumber Dari Akta Nominee”, *Journal of Comprehensive Science*, Vol.1 No.4, 2022, DOI: <https://doi.org/10.36418/jcs.v1i4.112>

- Gunanegara dan Sherly Meilintan Surya, “Kejahatan Pendaftaran Tanah Oleh (Oknum) Pejabat ATR/BPN di Wilayah Polda Metro Jaya Ditinjau Dari Hukum Administrasi Pemerintahan dan Hukum Pidana”, 2022, DOI: 10.13140/RG.2.2.29712.07684/1
- Inka Kristina Gultom, “Tanggung Jawab PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Atas Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Kehadiran Pemegang Hak”, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol.3 No.2 2020, DOI: <https://doi.org/10.34012/jihap.v3i2.1291>
- Made Agus Satria Wahyudi, “Kekuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Jual Beli Tanah Kavling”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.3, No.1, 2022, DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4241.92-97>
- Rizky Anggita,*et.al.*, "Tinjauan Yuridis Penerbitan Sertifikat Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut)", Notarius, Vol.14, No.2 2021
- Yogi Kristanto,*et.al.*, “Tanggung Jawab dan Wewenang Notaris/PPAT Terhadap Kekeliruan dan Pembatalan Akta Jual Beli Tanah”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1, No.2 September 2020, DOI: <http://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2465.197-202>

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta Hak dan Kewajibannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746)
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630)
- Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penunjukan Pejabat yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta Hak dan Kewajibannya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2344)  
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202)  
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

### **PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor Putusan Nomor :323Pdt.G/2015/PN Bks  
Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor Putusan Nomor :  
230/Pdt/2017/PT.BDG  
Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor Putusan Nomor :  
1098 K/Pdt/2018  
Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali Nomor Putusan Nomor :  
144 PK/Pdt/2020

### **WEBSITE**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, “Cara Membuat Akta Jual Beli (AJB) Tanah”, <https://ppid.semarangkota.go.id/kb/cara-membuat-akta-jual-beli-ajb-tanah/> , diakses Pada 18 Maret 2023

### **KAMUS**

Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, (United States of America: Thomson Reuters, 2009)  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016).  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanah>  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016).  
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penelitian>

### **WAWANCARA**

Hasil wawancara dengan Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Tanggal 17 Oktober 2022, Pukul 17.00 WIB.  
Hasil wawancara dengan Kiki Hertanto, S.H., Sp.N., Notaris/PPAT, Kantor Notaris Kiki Hertanto, Jakarta, Tanggal 24 Maret 2023, Pukul 16.00 WIB.  
Hasil wawancara dengan Robbyson Halim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris/PPAT, Secara daring melalui aplikasi zoom, Tanggal 17 Mei 2023 , Pukul 20.00 WIB.